



Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Agama sebagai Kerangka Formatif bagi Pembentukan Moral Peserta Didik

Hizkia Elfran Mawey

Sekolah Tinggi Teologi

Kezia Meysha Solli

Sekolah Tinggi Teologi

ABSTRACT

The moral crisis in contemporary education reveals that increased cognitive achievement and technological proficiency do not necessarily correspond to the development of mature attitudes and ethical responsibility among learners. Religious education faces a serious challenge when learning processes are reduced to the transmission of normative knowledge and the fulfillment of administrative requirements. This article aims to analyze instructional planning in Religious Education as a formative framework for the moral formation of learners. The study employs a qualitative-descriptive approach through a literature review of pedagogy, religious education, educational studies, and biblical reflection. The findings indicate that instructional planning constitutes a pedagogical-normative decision that decisively shapes value orientation, learning experiences, and the consistency of moral habituation among learners.

Keywords: Instructional Planning, Religious Education, Moral Formation, Values Education.

ABSTRAK

Krisis moral dalam pendidikan kontemporer menunjukkan bahwa peningkatan capaian kognitif dan penguasaan teknologi tidak selalu berbanding lurus dengan kedewasaan sikap dan tanggung jawab etis peserta didik. Pendidikan agama menghadapi tantangan serius ketika pembelajaran direduksi menjadi transmisi pengetahuan normatif dan kewajiban administratif. Artikel ini bertujuan menganalisis perencanaan pembelajaran Pendidikan Agama sebagai kerangka formatif bagi pembentukan moral peserta didik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui studi pustaka pedagogi, pendidikan agama, psikologi pendidikan, serta pendalaman biblik. Hasil kajian menunjukkan bahwa perencanaan pembelajaran merupakan keputusan pedagogis-normatif yang menentukan orientasi nilai, pengalaman belajar, dan konsistensi pembiasaan moral peserta didik.

Kata Kunci: Perencanaan Pembelajaran, Pendidikan Agama, Formasi Moral, Pendidikan Nilai.

PENDAHULUAN

Perubahan sosial yang cepat, penetrasi teknologi digital, dan pluralitas nilai telah memunculkan krisis moral dalam dunia pendidikan. Peserta didik menunjukkan peningkatan kemampuan kognitif, namun sering kali lemah dalam integritas, empati, dan



tanggung jawab sosial. Kondisi ini menegaskan bahwa pendidikan tidak cukup berfokus pada capaian akademik semata. Pendidikan agama, dalam konteks ini, memiliki tanggung jawab formatif untuk menjembatani pengetahuan nilai dan praksis hidup.

Namun, pendidikan agama sendiri kerap terjebak dalam pendekatan kognitif dan administratif. Pembelajaran diarahkan pada penyelesaian materi ajar, sementara dimensi pembentukan moral kurang mendapat perhatian sistematis. Salah satu faktor kunci yang sering diabaikan adalah perencanaan pembelajaran. Nana Sudjana menegaskan bahwa perencanaan pembelajaran merupakan proses pengambilan keputusan pedagogis yang menentukan arah dan kualitas pembelajaran¹. Dengan demikian, perencanaan bukan sekadar dokumen teknis, melainkan fondasi normatif pendidikan.

Artikel ini berangkat dari tesis bahwa perencanaan pembelajaran Pendidikan Agama harus dipahami sebagai kerangka formatif, yakni sistem pedagogis yang secara sadar diarahkan pada pembentukan moral peserta didik. Pendekatan ini menempatkan perencanaan sebagai locus utama integrasi tujuan nilai, strategi pembelajaran, dan evaluasi moral.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui studi pustaka. Sumber data meliputi literatur perencanaan pembelajaran, pendidikan agama, psikologi pendidikan, serta teks Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Analisis dilakukan secara konseptual-reflektif untuk merumuskan perencanaan pembelajaran sebagai kerangka formatif pembentukan moral peserta didik².

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Pembelajaran sebagai Keputusan Pedagogis-Normatif

Perencanaan pembelajaran tidak pernah bersifat netral. Setiap keputusan yang diambil dalam perencanaan—mulai dari perumusan tujuan, pemilihan materi, penentuan metode, hingga penyusunan evaluasi—selalu mencerminkan asumsi nilai tertentu tentang peserta didik, pengetahuan, dan tujuan pendidikan. Oleh karena itu, perencanaan pembelajaran harus dipahami sebagai tindakan pedagogis yang bersifat normatif, bukan sekadar prosedural atau administratif. Dalam kerangka ini, perencanaan pembelajaran berfungsi sebagai titik awal yang menentukan arah keseluruhan proses pendidikan.

Wina Sanjaya menegaskan bahwa perencanaan pembelajaran merupakan proses merancang pengalaman belajar secara sadar dan terarah, bukan sekadar menyusun urutan kegiatan belajar mengajar³. Pernyataan ini menegaskan bahwa perencanaan tidak

¹ Nana Sudjana, *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar* (Bandung: Sinar Baru AlGensindo, 2010), 19–22.

² John W. Creswell, *Educational Research* (Boston: Pearson, 2014), 32–35.

³ Wina Sanjaya, *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran* (Jakarta: Kencana, 2015), 3–7.



hanya berkaitan dengan efisiensi pembelajaran, tetapi juga dengan kualitas pengalaman belajar yang hendak dihadirkan kepada peserta didik. Dalam konteks pendidikan agama, pengalaman belajar tersebut harus diarahkan pada pembentukan orientasi moral dan tanggung jawab etis, bukan hanya pada penguasaan informasi normatif.

Ketika perencanaan pembelajaran tidak menempatkan nilai moral sebagai orientasi utama, pendidikan agama berisiko terjebak dalam formalitas kurikuler. Pembelajaran dapat berjalan tertib secara administratif—silabus tersusun rapi, materi tersampaikan, evaluasi terlaksana—namun kehilangan daya transformatifnya. Peserta didik mungkin mampu menjawab soal-soal kognitif tentang nilai-nilai agama, tetapi tidak menunjukkan perubahan sikap yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan nilai dan praksis moral.

Sebaliknya, perencanaan pembelajaran yang secara sadar berorientasi pada nilai akan membentuk keseluruhan pengalaman belajar peserta didik. Orientasi nilai tersebut tidak hanya tercermin dalam rumusan tujuan pembelajaran, tetapi juga dalam cara guru membangun interaksi kelas, memilih contoh-contoh kontekstual, serta merancang aktivitas reflektif. Dengan demikian, perencanaan pembelajaran menjadi instrumen awal pembentukan budaya belajar yang mendukung internalisasi nilai moral secara berkelanjutan.

Dalam perspektif ini, perencanaan pembelajaran pendidikan agama harus dipahami sebagai proses penataan pengalaman belajar yang memungkinkan peserta didik berjumpa dengan nilai, merefleksikannya, dan menghayatinya dalam tindakan. Perencanaan yang demikian menuntut kepekaan etis pendidik untuk menimbang dampak pedagogis dari setiap keputusan yang diambil. Dengan kata lain, perencanaan pembelajaran merupakan ruang praksis moral pendidik yang menentukan kualitas pembentukan moral peserta didik sejak awal proses pendidikan.

Landasan Biblika Perencanaan Pembelajaran

Pemahaman perencanaan pembelajaran sebagai keputusan pedagogis-normatif memperoleh legitimasi yang kuat dari perspektif biblik. Alkitab memandang perencanaan bukan sekadar aktivitas teknis, melainkan tindakan iman yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Amsal 16:3 menegaskan, “Serahkanlah perbuatanmu kepada TUHAN, maka terlaksanalah segala rencanamu,” yang menunjukkan bahwa perencanaan hidup—termasuk perencanaan pendidikan—harus diarahkan dan dipertanggungjawabkan kepada Allah⁴. Prinsip ini menempatkan perencanaan sebagai tindakan yang memiliki dimensi spiritual dan moral.

Kolose 3:23 memperkuat prinsip tersebut dengan menegaskan bahwa setiap pekerjaan dilakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia⁴. Ayat ini mengandung implikasi pedagogis yang penting: perencanaan pembelajaran pendidikan agama tidak boleh dipahami semata-mata sebagai pemenuhan

⁴ Alkitab, *Terjemahan Baru* (Jakarta: LAI, 1974), Amsal 16:3; Kolose 3:23



tuntutan institusional, tetapi sebagai bagian dari pelayanan iman. Dengan demikian, kualitas perencanaan mencerminkan integritas iman pendidik dan keseriusannya dalam membentuk kehidupan peserta didik.

Lebih jauh, Ulangan 6:5–9 memberikan gambaran yang sangat relevan tentang pendidikan iman sebagai proses yang berlangsung melalui pembiasaan hidup sehari-hari. Pendidikan iman tidak dibatasi pada ruang formal atau momen instruksional tertentu, melainkan terintegrasi dalam seluruh ritme kehidupan. Prinsip ini menegaskan bahwa pembentukan moral tidak terjadi secara instan atau sporadis, tetapi melalui proses yang terencana, berulang, dan konsisten⁵.

Implikasi pedagogis dari teks ini sangat signifikan bagi perencanaan pembelajaran pendidikan agama. Perencanaan tidak cukup hanya mengatur apa yang diajarkan, tetapi juga bagaimana nilai tersebut dihadirkan secara berulang dalam pengalaman belajar peserta didik. Dengan demikian, perencanaan pembelajaran harus memberi ruang bagi pembiasaan nilai, refleksi berkelanjutan, dan keterkaitan antara ajaran iman dan kehidupan nyata peserta didik.

Landasan biblika ini menegaskan bahwa perencanaan pembelajaran memiliki dimensi teologis yang tidak dapat diabaikan. Perencanaan menjadi sarana konkret untuk mengintegrasikan iman dan praksis pendidikan. Dalam kerangka ini, perencanaan pembelajaran pendidikan agama berfungsi sebagai jembatan antara nilai iman yang normatif dan pembentukan moral yang nyata dalam kehidupan peserta didik.

Prinsip-Prinsip Perencanaan Pembelajaran yang Formatif

Agar perencanaan pembelajaran benar-benar berfungsi sebagai kerangka formatif, diperlukan prinsip-prinsip yang jelas dan konsisten. Perencanaan yang formatif tidak hanya berorientasi pada pencapaian tujuan jangka pendek, tetapi pada pembentukan sikap dan karakter dalam jangka panjang. Tjokroamidjoyo menegaskan bahwa perencanaan yang baik harus bersifat sistematis, rasional, dan berorientasi tujuan⁶. Prinsip ini menjadi fondasi penting bagi perencanaan pembelajaran yang bermakna.

Prinsip pertama adalah kejelasan tujuan. Tujuan pembelajaran pendidikan agama tidak boleh dirumuskan secara sempit dalam ranah kognitif, tetapi harus mencakup dimensi sikap dan nilai. Rumusan tujuan yang eksplisit tentang pembentukan kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial akan mengarahkan seluruh proses pembelajaran pada pembentukan moral yang terukur dan terarah.

Prinsip kedua adalah relevansi konteks. Perencanaan pembelajaran yang formatif harus memperhatikan konteks kehidupan peserta didik. Nilai-nilai agama perlu dihadirkan dalam dialog dengan realitas sosial, budaya, dan tantangan konkret yang

⁵ Ibid. Ulangan 6:5–9.

⁶ Tjokroamidjoyo, Perencanaan Pembangunan (Jakarta: Gunung Agung, 2012), 15.



dihadapi peserta didik. Relevansi konteks memungkinkan nilai moral tidak dipahami sebagai konsep abstrak, melainkan sebagai pedoman hidup yang bermakna.

Prinsip ketiga adalah keterpaduan strategi pembelajaran. Strategi yang digunakan harus konsisten dengan tujuan pembentukan moral. Metode ceramah yang dominan tanpa ruang refleksi dan dialog berisiko menjadikan pendidikan agama bersifat satu arah. Sebaliknya, strategi yang melibatkan diskusi nilai, studi kasus, dan refleksi pengalaman akan mendukung internalisasi nilai secara lebih mendalam.

Prinsip keempat adalah evaluasi berkelanjutan. Evaluasi dalam pendidikan agama tidak dapat direduksi menjadi pengukuran kognitif semata. Evaluasi formatif perlu dirancang untuk memantau perkembangan sikap dan orientasi moral peserta didik. Dengan demikian, evaluasi menjadi bagian integral dari proses pembentukan moral, bukan sekadar alat pengukuran hasil belajar.

Keempat prinsip ini menegaskan bahwa perencanaan pembelajaran yang formatif merupakan proses yang kompleks dan reflektif. Perencanaan tidak hanya mengatur jalannya pembelajaran, tetapi membentuk kerangka pengalaman belajar yang memungkinkan nilai iman diinternalisasi secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam perspektif ini, perencanaan pembelajaran pendidikan agama menjadi fondasi utama bagi pembentukan moral peserta didik yang bertanggung jawab dan kontekstual.

Strategi pembelajaran perlu mendorong dialog, refleksi, dan pengalaman moral. Evaluasi tidak hanya mengukur penguasaan materi, tetapi memantau perkembangan sikap dan tanggung jawab peserta didik.

Perencanaan Pembelajaran sebagai Sistem

Perencanaan pembelajaran sebagai sistem menegaskan bahwa proses pendidikan tidak dapat dipahami sebagai rangkaian kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai kesatuan komponen yang saling berelasi dan saling memengaruhi. Dalam pendekatan sistemik, tujuan, materi, metode, media, evaluasi, serta karakteristik peserta didik tidak ditempatkan secara terpisah, tetapi dipandang sebagai elemen yang terintegrasi dalam satu kerangka pedagogis yang utuh. Surwana menegaskan bahwa pendekatan sistemik dalam perencanaan pembelajaran mencegah praktik pendidikan berjalan secara parsial, sporadis, dan inkonsisten⁷. Tanpa kerangka sistemik, pembelajaran berisiko kehilangan arah dan gagal mencapai tujuan formatifnya.

Dalam konteks pembentukan moral peserta didik, pendekatan sistemik menjadi sangat krusial. Moral tidak terbentuk melalui satu komponen tunggal, seperti penyampaian materi nilai atau evaluasi perilaku sesaat, melainkan melalui konsistensi seluruh sistem pembelajaran. Ketika tujuan pembelajaran menekankan pembentukan sikap, tetapi metode yang digunakan bersifat satu arah dan evaluasi hanya mengukur aspek kognitif, terjadi ketidaksinambungan sistem yang menghambat internalisasi nilai.

⁷ Surwana, Perencanaan Pembelajaran sebagai Sistem (Yogyakarta: UNY Press, 2014), 41–44.



Oleh karena itu, perencanaan pembelajaran sebagai sistem berfungsi menjaga keselarasan antara apa yang dituju, bagaimana proses dijalankan, dan bagaimana hasil pembelajaran dinilai.

Pendekatan sistemik juga menuntut pendidik untuk memandang peserta didik bukan sebagai objek pasif pembelajaran, melainkan sebagai subjek yang berinteraksi secara aktif dengan seluruh komponen sistem. Karakteristik peserta didik—usia, latar belakang sosial, pengalaman religius, dan dinamika kelas—menjadi variabel penting yang harus diperhitungkan dalam perencanaan. Dengan demikian, sistem pembelajaran tidak bersifat kaku, tetapi adaptif dan responsif terhadap kebutuhan pembentukan moral yang nyata.

Lebih jauh, perencanaan pembelajaran sebagai sistem mengimplikasikan tanggung jawab moral pendidik. Setiap keputusan pedagogis—misalnya pemilihan metode diskusi nilai, penggunaan studi kasus moral, atau perancangan refleksi pribadi—merupakan bagian dari sistem yang membentuk orientasi hidup peserta didik. Oleh karena itu, pendekatan sistemik menuntut kesadaran bahwa pembelajaran pendidikan agama tidak hanya mentransmisikan pengetahuan, tetapi membangun ekosistem pembentukan moral yang berkelanjutan.

Implikasi Prinsip Pembelajaran dalam Kerangka Sistemik

Prinsip pembelajaran memberikan arah normatif bagi bagaimana sistem pembelajaran dirancang dan dijalankan. Pembentukan moral peserta didik tidak terjadi secara mekanis melalui pemberian instruksi atau aturan perilaku, melainkan melalui proses belajar yang dirancang secara sadar, bertahap, dan berorientasi pada pengalaman bermakna. Prinsip pembelajaran menegaskan bahwa belajar merupakan proses aktif yang melibatkan keterlibatan kognitif, afektif, dan praksis peserta didik secara terpadu.

Salah satu prinsip utama adalah kejelasan tujuan pembelajaran. Tujuan yang dirumuskan secara eksplisit dalam ranah sikap dan nilai akan mengarahkan seluruh sistem pembelajaran pada pembentukan moral. Tanpa tujuan yang jelas, pembelajaran berisiko terjebak pada aktivitas rutin tanpa dampak formatif. Kejelasan tujuan memungkinkan pendidik memilih materi, metode, dan evaluasi yang konsisten dengan orientasi moral yang hendak dibangun.

Prinsip berikutnya adalah relevansi konteks pembelajaran. Nilai moral tidak dapat diajarkan secara abstrak dan terlepas dari realitas hidup peserta didik. Pembelajaran yang relevan mengaitkan nilai dengan situasi nyata, dilema etis, dan pengalaman sehari-hari peserta didik. Relevansi konteks memungkinkan peserta didik membangun pemahaman moral yang reflektif, bukan sekadar normatif.

Keterlibatan aktif peserta didik merupakan prinsip kunci lainnya. Pembelajaran yang bersifat partisipatif membuka ruang dialog, refleksi, dan pengambilan keputusan moral. Wina Sanjaya menegaskan bahwa prinsip pembelajaran yang baik harus mendorong partisipasi aktif, refleksi, dan pengalaman belajar yang memungkinkan



peserta didik membangun makna secara personal⁸. Dalam kerangka ini, pembentukan moral tidak dicapai melalui penyampaian norma secara verbal, tetapi melalui pengalaman belajar yang menuntut keterlibatan batin dan tanggung jawab pribadi.

Prinsip terakhir adalah konsistensi antara nilai yang diajarkan dan praksis pembelajaran. Ketika nilai tanggung jawab, kejujuran, dan kepedulian diajarkan, tetapi tidak tercermin dalam interaksi kelas, evaluasi, dan keteladanan pendidik, pembelajaran kehilangan kredibilitas moralnya. Konsistensi ini hanya dapat terjaga jika perencanaan pembelajaran dirancang secara sistemik dan reflektif.

Dengan demikian, prinsip pembelajaran tidak berdiri sendiri, melainkan berfungsi sebagai kerangka normatif yang menjiwai seluruh sistem perencanaan pembelajaran. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa pembelajaran pendidikan agama tidak berhenti pada transfer pengetahuan, tetapi bergerak menuju pembentukan sikap dan orientasi moral yang berkelanjutan.

Pembiasaan Kebajikan melalui Perencanaan Pembelajaran

Pembentukan karakter dan moral peserta didik tidak terjadi melalui satu kali pengalaman belajar, melainkan melalui pembiasaan kebajikan yang diulang secara konsisten dalam jangka panjang. James K. A. Smith menegaskan bahwa manusia dibentuk oleh kebiasaan yang secara perlahan mengarahkan orientasi hidup dan kasihnya⁹. Pernyataan ini menegaskan bahwa pendidikan moral tidak dapat dilepaskan dari praktik yang dihidupi secara berulang.

Dalam konteks ini, perencanaan pembelajaran berfungsi sebagai peta pembiasaan kebajikan. Melalui perencanaan yang matang, pendidik dapat memastikan bahwa nilai-nilai moral tidak hanya muncul sebagai topik sesaat, tetapi terintegrasi dalam seluruh pengalaman belajar. Misalnya, nilai tanggung jawab tidak hanya diajarkan melalui materi tertentu, tetapi dibiasakan melalui penugasan reflektif, kerja kelompok, dan evaluasi yang menekankan kejujuran akademik.

Pembiasaan kebajikan juga menuntut kesinambungan antarpertemuan pembelajaran. Perencanaan yang bersifat sistemik memungkinkan pendidik merancang progresivitas pengalaman moral, di mana peserta didik secara bertahap diajak untuk memahami, merefleksikan, dan menghayati nilai. Tanpa perencanaan yang konsisten, pembelajaran moral berisiko bersifat insidental dan tidak membentuk habitus karakter.

Lebih jauh, pembiasaan kebajikan menuntut keselarasan antara struktur pembelajaran dan budaya kelas. Budaya kelas yang menghargai dialog, keterbukaan, dan tanggung jawab bersama menjadi ruang aktualisasi nilai moral. Perencanaan pembelajaran berperan penting dalam membentuk budaya tersebut melalui pengaturan aktivitas, aturan kelas, dan mekanisme evaluasi yang adil dan reflektif.

⁸ Robert E. Slavin, *Educational Psychology* (Boston: Pearson, 2018), 98–101.

⁹ James K. A. Smith, *Desiring the Kingdom* (Grand Rapids: Baker Academic, 2009), 25–29.



Dengan demikian, perencanaan pembelajaran tidak hanya mengatur jalannya pembelajaran, tetapi membangun ekologi moral yang memungkinkan nilai diinternalisasi secara alami. Dalam kerangka ini, perencanaan pembelajaran pendidikan agama menjadi instrumen strategis pembentukan karakter, karena menghubungkan nilai iman dengan praktik hidup peserta didik secara konsisten dan berkelanjutan.

Implikasi bagi Pendidikan Agama

Pemahaman perencanaan pembelajaran sebagai kerangka formatif menuntut perubahan paradigma yang mendasar dalam praktik pendidikan agama. Selama ini, perencanaan pembelajaran kerap dipahami secara sempit sebagai dokumen administratif yang harus dipenuhi demi kepatuhan kurikuler dan akreditasi institusional. Akibatnya, perencanaan sering kali berhenti pada penyusunan tujuan kognitif, daftar materi, dan jadwal evaluasi, tanpa refleksi mendalam mengenai orientasi nilai dan dampak formatifnya bagi kehidupan peserta didik. Paradigma semacam ini tidak memadai untuk menjawab tantangan krisis moral yang dihadapi pendidikan kontemporer.

Perencanaan pembelajaran sebagai kerangka formatif menggeser fokus dari sekadar *what to teach* menuju *what kind of person is being formed*. Dalam pendidikan agama, pergeseran ini sangat krusial karena tujuan pembelajaran tidak dapat direduksi menjadi penguasaan konsep normatif atau hafalan ajaran. Pendidikan agama diarahkan pada pembentukan sikap, orientasi hidup, dan tanggung jawab moral peserta didik dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, perencanaan pembelajaran harus dipahami sebagai ruang refleksi pedagogis yang menata pengalaman belajar secara sadar dan terarah demi pembentukan moral yang berkelanjutan.

Implikasi langsung dari paradigma ini adalah tuntutan terhadap kompetensi guru. Guru pendidikan agama tidak cukup hanya menguasai materi ajar, tetapi perlu diperlengkapi untuk menyusun perencanaan pembelajaran yang reflektif, sistemik, dan berorientasi nilai. Perencanaan reflektif menuntut guru untuk secara kritis menimbang tujuan pembelajaran, relevansi konteks peserta didik, serta kesesuaian strategi pembelajaran dengan nilai moral yang hendak dibentuk. Tanpa refleksi semacam ini, perencanaan berisiko menjadi rutinitas teknis yang kehilangan daya transformatif.

Selain reflektif, perencanaan pembelajaran juga harus bersifat sistemik. Guru perlu memahami keterkaitan antara tujuan, materi, metode, media, dan evaluasi sebagai satu kesatuan yang membentuk pengalaman belajar peserta didik. Perencanaan yang parsial misalnya tujuan yang menekankan pembentukan sikap, tetapi evaluasi yang hanya mengukur aspek kognitif akan menghasilkan ketidakkonsistenan pedagogis yang melemahkan internalisasi nilai. Pendekatan sistemik memastikan bahwa seluruh komponen pembelajaran bergerak searah dalam mendukung pembentukan moral.

Lebih jauh, orientasi nilai dalam perencanaan pembelajaran menuntut kejelasan posisi normatif pendidikan agama. Wolterstorff menegaskan bahwa pendidikan agama harus diarahkan pada pembentukan kehidupan yang setia dan bertanggung jawab, bukan



sekadar pada penguasaan pengetahuan religius¹⁰. Pernyataan ini menegaskan bahwa perencanaan pembelajaran memiliki dimensi etis yang tidak dapat diabaikan. Setiap keputusan pedagogis—baik dalam pemilihan materi, metode, maupun evaluasi—secara implisit membentuk cara peserta didik memandang nilai, tanggung jawab, dan makna hidup.

Implikasi selanjutnya berkaitan dengan peran lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan perlu menempatkan perencanaan pembelajaran sebagai praksis strategis dalam sistem pendidikan agama. Dukungan institusional diperlukan agar guru memiliki ruang dan waktu untuk melakukan refleksi pedagogis yang mendalam, bukan sekadar memenuhi tuntutan administratif. Kebijakan akademik, supervisi pembelajaran, dan pengembangan profesional guru harus diarahkan untuk memperkuat kualitas perencanaan sebagai instrumen pembentukan moral.

Dengan demikian, perencanaan pembelajaran sebagai kerangka formatif bukan hanya tanggung jawab individual guru, melainkan komitmen sistemik lembaga pendidikan agama. Ketika perencanaan dipahami dan dijalankan secara reflektif, sistemik, dan berorientasi nilai, pendidikan agama memiliki peluang yang lebih besar untuk menjembatani kesenjangan antara pengetahuan normatif dan praksis moral peserta didik. Dalam kerangka inilah perencanaan pembelajaran berfungsi sebagai fondasi strategis pembentukan moral yang kontekstual, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Perencanaan pembelajaran Pendidikan Agama merupakan kerangka formatif yang menentukan kualitas pembentukan moral peserta didik. Ketika perencanaan dipahami sebagai keputusan pedagogis-normatif dan sistem pembelajaran yang terintegrasi, pendidikan agama mampu bergerak melampaui transmisi pengetahuan menuju formasi karakter yang berkelanjutan. Pembentukan moral tidak dicapai melalui penambahan materi ajar, melainkan melalui perencanaan pembelajaran yang reflektif, sistemik, dan berorientasi nilai¹¹.

Daftar Pustaka

- Alkitab. *Terjemahan Baru*. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 1974.
- Creswell, John W. *Educational Research*. Boston: Pearson, 2014.
- Holmes, Arthur F. *Contours of a World View*. Grand Rapids: Eerdmans, 1984.
- Sanjaya, Wina. *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Slavin, Robert E. *Educational Psychology*. Boston: Pearson, 2018.
- Smith, James K. A. *Desiring the Kingdom*. Grand Rapids: Baker Academic, 2009.

¹⁰ Nicholas Wolterstorff, *Educating for Life* (Grand Rapids: Baker Academic, 2004), 89–92.

¹¹ Arthur F. Holmes, *Contours of a World View* (Grand Rapids: Eerdmans, 1984), 67–70.



Jurnal Murid Kristus

Sudjana, Nana. *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.

Surwana. *Perencanaan Pembelajaran sebagai Sistem*. Yogyakarta: UNY Press, 2014.

Tjokroamidjoyo. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung, 2012.

UNESCO. *Reimagining Our Futures Together*. Paris: UNESCO, 2021.

Wolterstorff, Nicholas. *Educating for Life*. Grand Rapids: Baker Academic, 2004.